

ETIKA POLITIK DALAM ISLAM

M. Thahir Maloko

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Etika politik dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika, maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sehingga tercipta suatu kedamaian. Sebuah pemerintahan yang tidak didasari nilai-nilai etika dan moral yang baik, akan menimbulkan kekecauan. Apalagi pemimpinnya yang tidak menanamkan nilai etika, sudah pasti kekuasaannya akan hancur. Oleh sebab itu penguasa yang baik adalah penguasa yang memberikan suasana kebahagiaan bukan sebaliknya.

Kata Kunci:

Etika Politik

I. Pendahuluan

Di berbagai belahan dunia, umat Islam mengalami berbagai macam krisis baik krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan, krisis politik dan berbagai krisis lainnya, namun semuanya ini diawali dari krisis moral seorang pemimpin bangsa, kemudian diikuti oleh kehancuran moral rakyat. Maka tidak heran jika negara yang sedang mengalami krisis, banyak kejahatan yang terjadi baik berupa korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan asusila.

Sebuah pemerintah sudah jauh dari nilai etika, maka sudah dapat dipastikan negara tersebut akan mengalami kehancuran, dia tidak mampu mempertahankan kedaulatan rakyat, akhirnya rakyat yang menjadi sasaran. Mereka apatis terhadap rakyat dan tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan.

Mencintai rakyat dan berbuat baik terhadap rakyat merupakan suatu etika atau moral yang terpuji di dalam Islam dan menjadi seorang kepala negara sebagai orang yang terbaik yang dibanggakan. Tetapi sebaliknya sifat membenci rakyat dan

menjauhi rakyat serta mempertahankan paham egoistis dan tabiat sombong akan menjadi tanda moral yang tercela yang menyebabkan kepada orang yang jahat yang tidak disukai oleh rakyat.¹

Selain pemerintah, rakyatpun harus beretika dan bermoral baik. Ali bin Abi Thalib dalam pidatonya kepada rakyat yang mengikutinya; Demi Tuhan, sesungguhnya berat dugaan saya, bahwa musuh-musuh itu akan menang mengalahkan kamu karena moral mereka yang baik, yaitu mereka bersatu padu walaupun di dalam kesesatan, sedangkan kamu terpecah belah dalam kebenaran.²

Penguasa yang adil adalah penguasa yang berbuat adil diantara manusia dan menahan diri dari perbuatan jahat dan kerakusan. Penguasa yang zalim adalah penguasa yang kejam dan kekuasaannya tidak akan langgeng. Kelanggengan hanya akan terjadi dengan perilaku terhadap rakyat dan memelihara urusan-urusan secara bersama-sama.

Harus diketahui bahwa kemakmuran dan keruntuhan dunia bergantung kepada penguasa, jika penguasa adil maka dunia akan makmur dan rakyat merasa aman.³

Salah satu penyebab meningkatnya kebobrokan etika dan moral suatu bangsa adalah penganutnya tidak menjalankan agamanya dengan baik. Karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan kebenaran. Dengan demikian, kebobrokan etika suatu bangsa tidak boleh menyalahkan agama karena agama merupakan faktor yang sangat penting menyangkut moral bangsa.⁴ Tetapi yang harus disalahkan adalah penganut agama yang bersangkutan. Dari agama itulah muncul nilai-nilai iman, dan dengan adanya iman yang tertanam dalam setiap penganut agama, maka dengan sendirinya akan lahir etika dan moral yang tinggi. Hanya dengan modal dasar kepribadian seperti itu, aparat pemerintah dapat dibina lebih lanjut agar membangun komitmen moral yang lebih spesifik untuk mentaati nilai-nilai etika profesinya.⁵

II. Pembahasan

A. Pengertian Etika Politik

1. Pengertian Etika

- a. Etika (ing:ethies) ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk.⁶
- b. Etika adalah ilmu refleksi dan kritis.⁷

¹Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 159.

²*Ibid.*, h. 2.

³Imam Al-Ghazali, *At-Tibr Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk*, diterjemahkan oleh Arie B. Iskandar dengan judul *Etika Berkuasa, Nasehat Imam Al-Ghazali* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), h. 78.

⁴Jenderal Muhammad Syaid Khathab, *Latar Belakang Kemenangan Islam*, (Cet. I; Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992), h. 16

⁵Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Kebutuhan Demokrasi dalam Islam Indonesia* (Cet. I; Gresik: Pustaka Pelajar, 2000), h. 49

⁶Hasan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 973.

Etika bukan suatu tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran, jadi etika dan moral tidak berada di tingkat yang sama. Ajaran moral dapat diibaratkan dengan petunjuk bagaimana manusia harus memperlakukan sepeda motor dengan baik, sedangkan etika memberikan pemahaman tentang struktur dan teknologi sepeda motor. Moral mencoba menjawab pertanyaan “apa yang harus saya lakukan”, sedangkan etika ingin menjawab pertanyaan “bagaimana hidup yang baik”.

2. Pengertian Politik

Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal kata sifat tersebut berarti *acting or judging wisely, well judget*. Kata ini diambil dari kata latin *politicus*. *Politicus* yang berarti *raliting to citizen*.⁸ Politik juga berasal dari kata polis yaitu negara kota di Yunani. Dengan demikian, secara etimologi atau secara harfiah berbicara tentang politik adalah berbicara tentang negara.

Ada dua pendekatan yang dipakai oleh Deliar Noer dalam mendefinisikan politik, yaitu : *Pertama*, pendekatan yang menekan pada nilai dan *Kedua*, pendekatan yang menekan pada perilaku. Pendekatan tersebut mencakup pula nilai-nilai yang selaras dengan etika dalam menetapkan baik buruknya sebuah sistem pemerintahan seperti yang digunakan oleh pakar politik, selain menggunakan faktor-faktor sejarah.⁹

Pengertian Politik menurut Deliar Noer adalah :

Segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁰

B. Etika dan Moral Kepemimpinan Islam

Bercermin kepada realitas bangsa dewasa ini bahwa, runtuhnya kepercayaan rakyat sesungguhnya bukan hanya terhadap pemerintah saja, tetapi juga terhadap para pemimpin dan para elit politik formal, bahkan rakyat mempertanyakan mengapa ekonomi terus merosot, rasa aman dalam kehidupan sehari-hari terus memburuk.¹¹ Di berbagai tempat kerusuhan mudah terjadi dan gampang main hakim sendiri dengan mencabut nyawa sesamanya. Para elit politik semula saling mendukung hanya dalam waktu singkat sudah saling serang satu sama lain. Kepada anti gone dalam kisah Oedipus dari mitologi Yunani yang amat termashur, dari semua kejahatan yang bagai cacing mengeritiki jalan menuju istana raja-raja yang terburuk adalah nafsu berkuasa. Nafsu berkuasa mengadu saudara lawan saudara,

⁷Frans Magnis Susena, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Cet. XIII; Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 96.

⁸Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34

⁹Lihat, Deliar Noer, *Pengantar Pemikiran Politik* (Cet. III; Jakarta: Rajawali, 1983), h. 94

¹⁰Lihat, *ibid.*, h. 6

¹¹Ahmad Mubarak dan B. Wiwoho, *Etika dan Moral Kepemimpinan* (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2003), h. 22.

ayah lawan anak dan anak lawan tenggorokan orang tuanya.¹²

Konsep yang amat tegas mencita-citakan suatu negara yang berdasarkan akal budi dan moral keagamaan adalah Siti Augustine (254-430 M) dalam bukunya *"Civitate Dei"* (Negara Tuhan), ia menggambarkan adanya dua moral yang terdapat pada manusia, yaitu moral baik dan moral buruk. Terjadi perkelahian dan pembunuhan antara kedua putra Adam, tidak lain merupakan gambaran dari perjuangan antara pemimpin yang bermoral baik yang membentuk *"Civitate Dei"* (Negara Tuhan) dengan pemimpin yang bermoral jahat yang membentuk *"Civitate Diaboli"* (Negara Setan).¹³

Peran pemimpin sungguh sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, rusak rakyat karena rusak penguasa dan rusak penguasa karena rusak ulamanya. Semuanya itu membenarkan kesimpulan bahwa pemimpin adalah teladan, sehingga teladan yang baik akan memberikan hasil yang baik dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menurut Al-Ghazali, ulama harus tegak menjaga fungsinya sebagai pemegang amanah Allah, penjaga waris Nabi dan penegak politik keadilan. Para ulama cendekiawan harus bersikap waspada dan jangan mendudukkan diri kepada politik kezaliman (zalim terhadap kehormatan dan hak asasi manusia, zalim terhadap harta benda rakyat, dan zalim terhadap jiwa rakyat), bahkan jika dianggap perlu harus mengambil sikap uzlah, menjauhkan diri dari segala soal yang berbau politik dan pemerintah.¹⁴

Islam telah banyak mengatur etika dan moral kepemimpinan, baik di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad saw serta ijma para ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan etika dan moral kepemimpinan, namun inti dari semua itu adalah *amanah* dan *keadilan* sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁵

Keadilan dalam hal ini adalah di dalam memutuskan suatu perkara tidak berat sebelah, keadilan harus dinikmati setiap orang baik muslim maupun non muslim, pejabat maupun bukan pejabat, keluarga maupun bukan keluarga, hendaknya putusan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan atas permusuhan.

¹²Ibid., 23.

¹³Ibid., h. 24.

¹⁴Ibid., h. 27.

¹⁵Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 277.

Masalah kepemimpinan dewasa ini merupakan kunci utama dalam menuju negara dan masyarakat yang bermoral.¹⁶ Struktur kejahatan itu adalah akibat politik kekuasaan. Perimbangan kekuatan politik mengabaikan upaya serius mengatasi korupsi dan ketidakadilan. Praktek kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, namun untuk mempertahankan kekuasaan. Maka banyak konsesi diberikan yang mengorbankan tujuan utama politik (kesejahteraan bersama).¹⁷

Etika dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa.¹⁸ Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi, bagaimana etika pemimpin yang telah digagas oleh pemerhati etika politik seperti:

1. Etika Politik dalam Sistem Politik Madani

Konsep masyarakat madani dapat dikatakan seirama dengan etika politik Islam dan demokrasi masyarakat madani menghendaki:

- a. Legislatif benar berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat serta berupaya maksimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
- b. Yudikatif yang jujur, adil, terpercaya dan mampu membuat atau menjatuhkan sanksi yang adil terhadap siapapun tanpa memandang jabatan yang diemban.
- c. Eksekutif yang fungsional, bersih, jujur dalam melaksanakan mandat rakyat.
- d. Masyarakat harus jujur dan berani berkata benar dalam menyampaikan tuntutan dan kewajiban taat pada berbagai aturan yang memberikan kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Etika Menurut Plato

Perwujudan etika politik Plato dengan cara membentuk negara idael yaitu suatu bentuk negara dimana pemerintah mampu melayani secara langsung dengan cara menetapkan tujuan negara sama dengan tujuan manusia dalam negara (warga negara) yaitu kesenangan dan kebahagiaan. Pada sisi lain teori politik Plato juga melakukan pelarangan etika politik dimana Plato menempatkan orang-orang yang kalah dalam perang diposisikan sebagai budak yang tidak mempunyai hak milik, hak berpendapat dan hak politik dalam negara.¹⁹

Beberapa perinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, maka Islam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan *abusei* atau penyalagunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Karena itu pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.

¹⁶Ahmad Mubarak dan B. Wiwoho, *op.cit.*, h. 30.

¹⁷Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), h. 33.

¹⁸Lihat, Iman Al-Ghazali, *op.cit.*, h. 91

¹⁹Haryatmoko, *op.cit.*, h. 11.

Apabila beberapa perinsip ajaran Islam tersebut di atas tidak diamalkan dengan baik dan benar, maka akan muncul *keterpurukan etika* dan *moral pemimpin* sebagai berikut:

Pertama, keterpurukan etika dan moral pemimpin disebabkan masih ada hubungannya dengan korupsi yaitu pemimpin yang sangat ambisius untuk mendapatkan harta yang banyak, tidak mempertimbangkan halal dan haram yang penting tujuan tercapai. Sehubungan dengan itu, Baharuddin Lopa mengatakan bahwa Krisis moral sudah menjangkit semua tingkat dan sektor termasuk pemerintah, sehingga keadilan sebagai sumber ketentraman dan perwujudan kesejahteraan di Indonesia belum terlaksana dengan baik.²⁰

Selain itu, beliau mengatakan bahwa sulit untuk menegakkan hukum kerana sulit menentukan ujung pangkal krisis moral, oleh karenanya para pejabat pengambilan keputusan memberikan teladan kepada semua jajarannya, jangan harap suatu sistem akan berjalan dengan lancar kalau pemimpinnya tidak mampu memberikan teladan bagi jajarannya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Maidah/5:42 sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya.²¹

Kedua, keterpurukan etika dan moral seorang pemimpin adalah pemahaman terhadap ajaran agama sebagai pengendali dalam melakukan tindakan, kerana lemahnya agama dapat menyebabkan para pemimpin tidak memperhatikan nilai-nilai etika dan moral. Oleh karenanya wajib bagi seorang pemimpin untuk memperbaiki pemahaman terhadap ajarannya.²²

Ketiga, keterpurukan etika dan moral pemimpin adalah pemimpin yang bersikap sombong. Sebagaimana halnya raja Namruz. Dia adalah orang pertama yang melakukan kesombongan di muka bumi yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ketika terjadi krisis ekonomi pada zaman kerajaannya, rakyat sangat menginginkan makanan, tetapi raja Namruz tidak mau memberikan makanan yang dia miliki walaupun membeli, jika rakyat tidak mau bersujud kepadanya dan mengucapkan Kamulah Tuhanku.²³ Itulah sikap sombong yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin yang tidak memperdulikan nilai-nilai etika dan moral dalam kepemimpinannya.

Keempat, kurangnya rasa tanggung jawab. Kekuasaan bukanlah sebuah kenikmatan yang harus dihirup, melainkan suatu tanggung jawab, maka berat harus dipikul dan mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah swt yang secara demokrasi adalah dihadapan rakyat secara terbuka dan jujur. Berkuasa adalah bukan memegang kendali politik sambil menikmati sumber daya dengan cara menindas, melainkan terkandung pertanggungjawaban politik yang berat di dalamnya.²⁴

²⁰Baharuddin Lopa, *Masalah-Masalah Politik Hukum Sosial Budaya dan Agama, Sebuah Pemikiran* (Cet. I; Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 67.

²¹*Ibid.*, h.70.

²²Imam Al-Ghazali, *op.cit.*, h. 90.

²³Muslim, *Ancaman Bagi Penguasa Zalim Tetap Abadi di Neraka* (Cet. I; Surabaya: CV. Citra Pelajar, 1998), h. 10.

²⁴Muhammad Toha Anwar, *Fiqih Politik, Tinjauan Partai Politik Islam* (Cet, I; Jakarta: Studi Press, 2000), h. 11

Kelima, tidak jujur. Tanpa kejujuran, maka keutamaan moral lainnya kehilangan nilai. Bersikap baik kepada orang lain, tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracum. Hal yang sama berlaku pada sikap tenggang rasa dan mawas diri, tanpa kejujuran, dua sikap itu tidak lebih dari sikap berhati-hati tanpa tujuan untuk tidak ketahuan maksud yang sebenarnya.²⁵

Sikap jujur harus dimiliki setiap pemimpin, karena tanpa kejujuran seorang penguasa atau seorang pemimpin, segala tindakannya akan mengarah kepada kemunafikan dan tanpa kejujuran keutamaan etika dan moral kehilangan nilai.

C. Alquran Sebagai Sumber Gagasan Etika Politik

Alquran adalah petunjuk bagi umat manusia, maka tidak berlebihan apabila alquran dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab "bagaimana hidup yang baik".²⁶ Dengan demikian alquran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Imran/3:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²⁷

Kandungan ayat tersebut di atas menerangkan tentang etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.²⁸

Dalam sejarah, kaum Majusi telah menguasai dunia selama empat ribu tahun. Kelanggengan kekuasaan hanya dapat terjadi dengan perilaku adil terhadap rakyat dan memelihara urusannya secara bersama-sama. Mereka tidak membiarkan kezaliman dalam urusan agama dan keyakinan mereka. Mereka mengelolah

²⁵Frans Magnis-Suseno, *op.cit.*, h. 142.

²⁶*Ibid.*, h. 187.

²⁷Departemen Agama, RI., *op.cit.*, h. 71.

²⁸ Abdul Muin Salim, *op.cit.*, h. 260.

negaranya dengan adil. Mereka juga senantiasa berbuat adil terhadap manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemakmuran dan kehancuran dunia bergantung kepada penguasanya. Jika penguasa adil, maka dunia akan makmur dan rakyat akan merasa aman, sebaliknya penguasa tidak adil, maka dunia akan runtuh.

Sejalan dengan apa yang dipaparkan di atas, Faisal Baasir mendasarkan etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai luhur ajaran agama adalah suatu keharusan. Sebab agama merupakan sistem nilai yang diyakini kebenarannya, ia adalah lentera dan panduan kehidupan serta modal ketenangan jiwa sebelum seseorang menentukan suatu tindakan tertentu.²⁹

Prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kekuasaan sebagai amanah. Prinsip amanah tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.³⁰

Makna *amanah* adalah “titipan” atau “pesan”. Dalam demokrasi Islam, amanah dipahami sebagai “sesuatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu bentuk pemeliharaan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perinsip-perinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.³¹

Seseorang yang bertanggungjawab diharapkan takut kepada Allah terhadap apa yang ditugaskan kepadanya dari urusan umat agar ia ingat betapa besarnya amanah yang diemban untuk mengerjakannya.

Alquran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Oleh karenanya perilaku rakyat sangat tergantung dari kebijakan para pemimpin, rakyat bermoral adalah cerminan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggungjawab adalah pemimpin yang beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Dengan demikian segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama pemimpin tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh Allah swt dalam Alquran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia

²⁹Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. xxxvii.

³⁰Departemen Agama, RI., *op.cit.*, h. 87.

³¹Faisal Baasir, *op.cit.*, h. 145.

dan akhirat.

III. Kesimpulan

Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Alquran dan hadis. Dalam Alquran menyerukan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah.

Perinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktifitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Alquran, maka aktifitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau kemungkaran.

Kepustakaan

Alquran al-Karim.

Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Keharusan Demokrasi dalam Islam Indonesia.* Cet. I; Gresik: Pustaka Pelajar, 2000.

Anwar, Muhammad Toha. *Fiqh Politik, Tinjauan Partai Politik Islam.* Cet, I; Jakarta: Studi Press, 2000.

Baasir, Faisal. *Etika Politik, Pandangan Seorang Politisi Muslim.* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya.* Semarang: Toha Puta, 1989.

Al-Ghazali, Imam. *At-Tibr Masbuk fi Nashihah al-Muluk.* Diterjemahkan oleh Arief B. Iskandar dengan judul *Etika Berkuasa, Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazali.* Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan.* Cet. I; Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.

Khatab, Mahmud Syaid. *Latar Belakang Kemenangan Islam.* Cet. I; Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992.

Lopa, Baharuddin. *Masalah-Masalah Politik Hukum Sosial Budaya dan Agama, Sebuah Pemikiran.* Cet. I; Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Mubarok, Achmad dan B. Wiwoho. *Etika dan Moral Kepemimpinan.* Cet. I; Jakarta: Bina Rana Pariwisata, 2003.

Muslim. *Ancaman Bagi Penguasa Dzalim Tetap Abadi di Neraka.* Cet. I; Surabaya; CV. Citra Pelajar. 1998.

Noer, Deliar. *Pengantar Pemikiran Politik.* Cet. III; Jakarta: Rajawali, 1983.

Salim, Abdul Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran.* Cet. III; Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2002.

Sadly, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Edisi Khusus, Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Cet. XIII; Yogyakarta: Kanisius, 2001.